

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam demokrasi didasarkan pada pemikiran bahwa rakyat yang baik menguasai kedaulatan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mewakili mereka. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, pemikiran tentang demokrasi kemudian juga diterapkan di Indonesia. Modernisasi politik ditandai dengan pentingnya partisipasi politik. Di negara yang penduduknya masih dilimpahkan adat dan merek dagang politik masih di udara oleh berbagai pertemuan keputusan, maka pada saat itu kerjasama politik warga akan agak rendah. Sementara itu, tingkat partisipasi warga negara dalam politik cenderung meningkat di negara yang berhasil menyelesaikan proses modernisasi politiknya⁷.

Hal ini menunjukkan bahwa, tergantung pada tingkat demokrasi suatu negara, banyak orang yang berpartisipasi dalam politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “partisipasi” sendiri berarti ikut serta dalam kegiatan. Hal ini mengandung arti bahwa partisipasi lebih bersifat sukarela dan dapat diberikan oleh siapa saja, tanpa memandang jabatan atau ruang lingkup. Hal berikutnya yang harus dicari dalam konsep peran adalah definisi “partisipasi” yang menekankan pada tanggung jawab atas posisi atau posisi yang dipegang oleh

⁷ Yusuf Widodo, “Peran Dan Partisipasi Nahdlatul Ulama Dalam Politik Lokal (Studi Tentang Peran Dan Partisipasi Politik Kiai Dalam Pengelolaan Kekuasaan Pemerintahan Di Kabupaten Gresik)” (Universitas Brawijaya, 2014). hlm 21-23.

seorang individu.

Partisipasi aktif individu dan kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka itulah yang dimaksud dengan partisipasi politik. Ini termasuk tindakan oposisi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi politik, yang terpenting, adalah proses aktif; seseorang mungkin menjadi anggota partai atau kelompok penekan tetapi tidak berpartisipasi aktif dalam organisasi. Partisipasi dalam politik konvensional, seperti pemungutan suara dan politik partai, termasuk dalam tindakan keterlibatan aktif⁸. Selain itu, Budiardjo memberikan definisi yang lebih jelas tentang partisipasi politik, yaitu partisipasi aktif individu dan kelompok dalam proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan. Ini termasuk memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada kebijakan pemerintah (kebijakan publik) dan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin negara.

Budiardjo menjelaskan tentang pemahaman dan pemikirannya berdasarkan pengertian partisipasi politik yang berasal dari pengertian partisipasi politik yang berasal dari tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman dalam tentang partisipasi politik, diantaranya:

1. Helbert McClosky dalam Buku Referensi Global Sosial

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela anggota masyarakat di mana mereka berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan sukarela dimana anggota masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan penguasa dan, secara

⁸ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1982). hlm 367.

langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan publik akan disebut sebagai “partisipasi politik”.

2. Dalam Handbook of Political Science, Norman H. Nie dan Sidney Verba

Aktivitas pribadi hukum warga negara yang dikenal sebagai partisipasi politik bertujuan sedikit banyak secara langsung untuk mempengaruhi pemilihan pejabat negara dan/atau tindakan mereka. Kami menggunakan istilah “partisipasi politik” mengacu pada tindakan hukum yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan yang kurang lebih eksplisit untuk mempengaruhi pilihan dan/atau tindakan pemerintah. cara umum yang berwibawa bagi masyarakat, teropong secara khusus adalah "tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah".

3. Dalam "No Easy Choice," Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

Partisipasi dalam Politik di Negara Berkembang: Tindakan warga negara yang bertindak sebagai individu dengan maksud mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dikenal sebagai partisipasi politik. Partisipasi individu atau kelompok, terorganisir atau tidak terorganisir, stabil atau sporadis, sukarela atau koersif, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif Kami menyebut aktivitas oleh warga negara yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah sebagai partisipasi politik. Partisipasi individu atau kelompok, terorganisir atau tidak terorganisir, efektif atau tidak efektif).

Partisipasi politik memberi masyarakat kesempatan untuk membantu memilih pemimpinnya. Masyarakat berhak menilai dan mengontrol pemimpinnya melalui pemilihan tersebut. Rakyat sebagai poros demokrasi memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi politik akan lahir

dari demokrasi. Yang dimaksud dengan “partisipasi politik” adalah pengertian tingkat keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, berpartisipasi dalam partai politik, dan sebagainya.

Menurut sudut pandang yang berbeda, istilah “partisipasi politik” mengacu pada pola perilaku seseorang, yang erat kaitannya dengan partisipasi politik. Jenis partisipasi politik lebih cenderung mengarah pada kegiatan aktual jika lebih banyak bersumber dari kehendak individu atau kelompok dalam ranah politik. Huntington menyatakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, tetapi sikap elite politik terhadap partisipasi ternyata yang paling signifikan. Huntington lebih lanjut membagi partisipasi politik menjadi dua kategori: partisipasi termobilisasi dan partisipasi otonom. Partisipasi yang dikerahkan hanya terjadi ketika elit politik berusaha melibatkan masyarakat umum dalam kegiatan politik. Partisipasi sendiri lebih mudah jika elit politik menginginkannya⁹.

Kerangka baru untuk partisipasi politik disediakan oleh keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam politik. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi agama yang memiliki pandangan yang agak ekstrim mengenai hakikat partisipasi politik, yang pada hakekatnya adalah tindakan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada kecenderungan untuk meyakini bahwa keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam politik merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Namun, ada pihak yang berpendapat bahwa agama tidak bisa sepenuhnya disandingkan dengan politik. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa dalam konteks Islam, para ahli harus membuat

⁹ Ibid. hlm 41-42.

keputusan atau kebijakan, sedangkan dalam demokrasi, rakyat banyak berbicara dalam proses pengambilan keputusan.

Pandangan Islam tentang kepemimpinan proses dan ambiguitas konsep demokrasi membuat kiai menjadi sangat kritis dalam memaknai partisipasi politik. Ada persepsi yang meluas bahwa tujuan utama dari partisipasi politik adalah untuk membentuk gaya kepemimpinan yang sejalan dengan pandangan ideologi dan metode serta memberikan pengaruh terhadap kebijakan atau keputusan. Huntington berpendapat bahwa sikap kiai terhadap tingkatan, bentuk, dan dasar partisipasi yang mereka inginkan akan sangat dipengaruhi oleh hasil kemampuan mereka dalam bidang-bidang berikut:¹⁰

1. Untuk memperoleh kekuasaan dan tetap berkuasa; dan
2. Untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik tambahan, seperti pembangunan ekonomi, pemerataan sosial ekonomi, kemerdekaan nasional, reformasi nasional, dan revolusi.

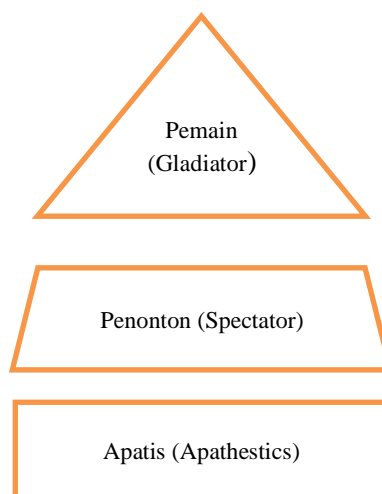
Terlepas dari partisipasi politik kiai dalam pengelolaan kekuasaan pemerintah, partisipasi politik juga bertujuan untuk membangun sumber daya masyarakat dan mempengaruhi kebijakan. Moesa menyebutkan bahwa salah satu tujuan Nahdlatul Ulama lewat Kiai adalah untuk membentuk masyarakat yang lebih beradab¹¹. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat merupakan salah satu hasil yang dapat diharapkan dari peningkatan sumber daya masyarakat. pernyataan yang berkaitan dengan pendapat Budiarjo yang mengatakan, untuk menjaga kekokohan politik, mayoritas mengatur pemerintahan adalah suatu hal

¹⁰ Ibid. hlm 43.

¹¹ Asep Syaiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). hlm 195.

opsional untuk tujuan penting ini. Orang-orang dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang rendah dianggap merusak stabilitas, terutama ketika demokrasi pertama kali muncul. Kompleksitas kepentingan warga yang beragam akan mempersulit pengambilan keputusan yang tepat. Partisipasi politik sendiri dipandang sebagai alat oleh kelompok kepentingan dalam mencapai tujuan, khususnya dalam proses penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi dan pemilu. Masyarakat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan organisasi kepentingan yang mengelilinginya¹².

Sudut pandang ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan biaya partisipasi politik publik, partisipasi politik kiai dianggap berada pada tingkat yang tinggi. Milbart dan Goel memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi politik melalui piramida, seperti terlihat pada gambar berikut¹³:



Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik

Sumber: Miriam Budiardjo¹⁴.

Berdasarkan piramida tersebut, ada tiga tingkatan partisipasi politik. Pemain

¹² Budiardjo, *Op.cit.*, hlm 371.

¹³ Ibid. hlm 372.

¹⁴ Ibid. hlm 327.

atau gladiator membentuk level pertama. Ini adalah orang-orang yang terlibat dalam politik dan membantu membuat keputusan untuk pemerintah. Level ini hanya digunakan oleh sejumlah kecil orang. Tingkat kedua adalah penonton atau penonton, atau partisipasi politik mayoritas, di mana seseorang hanya memberikan kontribusi yang kecil, seperti menggunakan hak pilihnya. Tingkat tiga termasuk dalam kelompok apatis yang dikenal sebagai apathetic, yang mencakup orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut piramida tersebut, partisipasi politik kiai layak diklasifikasi pada level pemain karena partisipasi kiai dalam politik melampaui penggunaan hak pilih secara umum hingga pengelolaan kekuasaan dalam pemerintahan.

Peranan Nahdlatul Ulama melalui Kiai memiliki peranan sangat besar dalam pengelolaan kekuasaan pemerintah dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Muhtadi¹⁵ yang menyatakan peran komunikasi kiai biasanya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kiai merupakan komunikator yang memiliki kredibilitas eksistensi karismatik. Bahkan di Indonesia, kiai dianggap sebagai orang yang istimewa pada masa peralihan umat Islam secara keseluruhan. Dalam proses pengambilan keputusan, pendapatnya menjadi acuan utama untuk isu-isu yang melibatkan agama serta hubungan sosial, politik, dan budaya antara kepentingan individu dan kolektif. Meski komunikasi yang ia mainkan biasanya satu arah, penyampaian pesannya juga dinilai efektif. Karena kedudukannya yang istimewa ini, kelompok kiai sering ditempatkan di lembaga tertinggi, seperti majelis syuro dan majelis syura.

¹⁵ Muhtadi, *Op.cit.*, hlm 195.

Partisipasi politik kiai dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan memiliki nilai negatif, mirip dengan gagasan peran politik, yang akan mengurangi potensi untuk mempertahankan kekuasaan. Ada tiga faktor penting yang berperan penting dalam mempertahankan kekuasaan, antara lain¹⁶:

1. Sifat normatif politik pada umumnya mengesampingkan manfaat. Partisipasi politik yang berorientasi pada orientasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun kiai lupa bahwa dukungan dari masyarakat tidak berlangsung selamanya, sehingga kekuasaan pada akhirnya tidak dapat dipegang.
2. Kontras dalam penegasan di antara para perintis dan orang-orang pada umumnya minat. Pilihan masyarakat terhadap seorang kiai untuk memimpin daerah memiliki konsekuensi yang kompleks bagi kepentingan masyarakat, namun pemimpin memiliki kekuasaan untuk mendahulukan kepentingan yang mana. Akibatnya, kepentingan masyarakat tidak dapat sepenuhnya terwujud. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kiai sering muncul akibat perbedaan pandangan tersebut.
3. Pemikiran politik yang positif berlaku. Sudut pandang ini dapat diuraikan bahwa kiai memiliki keyakinan yang sama dengan masyarakat Islam adalah jaminan bantuan politik.

Sehubungan dengan sebagian perasaan di atas, dukungan politik kiai masuk administrasi kekuasaan legislatif adalah demonstrasi yang disengaja dari kiai as penduduk untuk berkontribusi dalam arah atau pendekatan, memperluas aset area

¹⁶ Budiardjo, *Op.cit.*, hlm 222-224.

lokal dan target fundamentalnya yaitu mengikuti tipe otoritas kiai. Meskipun kiai memberikan kontribusi yang signifikan, mereka juga harus memperhatikan partisipasi politiknya. Ada sejumlah faktor yang dapat mencegah mereka mempertahankan kekuasaan. Demokrasi lokal dimulai dengan perolehan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan harus dipahami sebagai representasi dari kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik.

2.1.2 Nahdlatul Ulama dan Konsep Politik Kebangsaan

2.1.2.1 Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Politik Kebangsaan

Menurut KH Abdul Muchith Muzadi menjelaskan bahwa dalam politik kebangsaan Nahdlatul Ulama wajib menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai landasan bangsa dari kelompok separatisme yang berupaya mengubah Pancasila serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁷. Dari segi politik kebangsaan, hal ini berarti Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya ideologi Pancasila bertahta dan menjadi pedoman bagi rakyat tanpa mempersoalkan unsur-unsur tertentu. identitas sosial sepanjang tidak berusaha melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengubah kebijakan negara. Untuk menata bangsa lebih baik dengan tetap berorientasi pada fikih siyasah dalam konteks Indonesia yang berpola simbiosis dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai nuansa negara, NU kemudian melangkah dengan mengelola lahan dakwah, ibadah, dan usaha ajaran Tuhan dalam kehidupan pribadi,

¹⁷ A Rofi'i, "Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi," *Al-Daulah* 4, no. 2 (2014). hlm 396.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan terhadap sila tunggal Pancasila adalah buktinya watak publik NU yang memandang Pancasila sebagai elaborasi kualitas Islam¹⁸. Jika Pancasila dilaksanakan dengan baik, itu menandakan bahwa prinsip-prinsip Islam telah diterapkan.

Nurcholis Madjid, seorang pemikir Muslim Indonesia, mengemukakan pandangannya tentang hubungan antara Nasionalisme dan Islam. Bagi Madjid, Nasionalisme yang sejati, yang mengutamakan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa pengecualian, merupakan elemen yang tak terpisahkan dari konsep "Pemerintahan Madinah" yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya.¹⁹

Robert N. Bellah mengacu pada contoh awal dari Nasionalisme modern sebagai sistem yang diterapkan dalam masyarakat Madinah selama pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan penerusnya, para khalifah. Dalam karya tulisnya, Bellah mengungkapkan bahwa sistem yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian diteruskan oleh para khalifah adalah suatu contoh konkret dari sebuah komunitas nasional modern yang melebihi apa yang mungkin dibayangkan.²⁰

Kedua konsep teori yang dapat dikaitkan dalam konteks ini adalah Nasionalisme dan Konsep "Pemerintahan Madinah" menurut Nurcholis Madjid. Nurcholis Madjid menyajikan pandangannya bahwa Nasionalisme yang sejati, yang mengedepankan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa pengecualian,

¹⁸ muhamad Mustaqim, "Politik Kebangsaan Kaum Santri : Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama," *ADDIN* 9, no. 2 (2015): 345.

¹⁹ Mugiyono, "Relasi Nasionalisme Dan Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global," *Ilmu Agamn* 15, no. 02 (2014): hlm 7.

²⁰ *Ibid.*, hlm 7.

memiliki keterkaitan dengan konsep "Pemerintahan Madinah" yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam pandangan ini, Nasionalisme tidak hanya dipahami sebagai bentuk identitas nasionalistik, tetapi juga sebagai konsep yang mencakup keadilan sosial dan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Robert N. Bellah menyumbangkan perspektifnya dengan merujuk pada contoh awal Nasionalisme modern yang diimplementasikan dalam masyarakat Madinah selama pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah. Dengan melihat sistem yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah, Bellah menggambarkan bahwa hal tersebut merupakan suatu contoh konkret dari komunitas nasional modern yang melebihi ekspektasi.

Kaitan antara kedua teori ini dapat ditemukan dalam pemahaman bahwa konsep Nasionalisme yang sejati, sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholis Madjid, memiliki akar dan relevansi dalam prinsip-prinsip yang diterapkan dalam "Pemerintahan Madinah" pada masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah. Ini menciptakan suatu landasan untuk memahami hubungan antara identitas nasional dan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial yang terwujud dalam masyarakat Madinah.

Politik kebangsaan dapat memoderasi partisipasi NU dalam politik. Politik kebangsaan NU adalah politik yang mengutamakan negara dan agama sebagai tumpuan rakyat²¹. Jelas, masalah agama dan negara tidak menjadi prioritas utama. Berjalanlah seumur hidup karena semuanya sama pentingnya. Islam tidak pernah

²¹ Nevy Rusmarina Dewi et al., "Politik Kebangsaan Dalam Membendung Gerakan Radikalisme Oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati National Politics in Repressing the Radicalism Movement by Nahdlatul Ulama of Pati Regency," *Potret Pemikiran* 25, no. 1 (2021): 66.

mengajarkan mendirikan negara tertentu atau sistem negara Islam. Berdirinya negara Islam hanya akan menjadikan warga negara non-Muslim sebagai warga negara kelas dua. Dan itu akan mempengaruhi warga Muslim abangan/nominal yang Islamnya jelas berbeda dengan santri²².

Apa yang dituntut oleh umat Islam adalah menjadikan Islam sebagai bagian dari pengamalan kehidupan sehari-hari seperti tauhid, pengamalan pokok-pokok Islam, membantu individu, ahli dalam pekerjaan menggabungkan menunjukkan pengekanan dalam setiap malapetaka dan pengalaman yang terjadi. Menurutnya, sistem Islam tidak diperlukan jika semua nilai-nilai sebelumnya terpenuhi, bahkan ketaatan seorang Muslim tidak diukur dengan sistem atau negara Islam.

2.1.2.2 Nalar Kebangsaan Nahdlatul Ulama

Materi pelajaran yang sering dijadikan bahan diskusi terbatas atau umum, debat, dan diskursus (wacana) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat di masa lalu. Wacananya yang berkembang pada masanya mencerminkan kondisi perkembangan intelektual masyarakat. Oleh karena itu, pola pikir dan perilaku seseorang atau suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pola pikir dan perilaku yang berkembang di seluruh dunia saat itu, termasuk dalam bidang agama. Selain itu, selalu ada proses dialektika yang berlangsung, yang menandakan bahwa perkembangan pola pikir memang tidak seragam. Sebagai anggota masyarakat global, mentalitas dan tindakan Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari pola pikir yang berulang. Konsekuensinya, bagian ini akan berbicara tentang materi atau percakapan diskusi dan percakapan tentang patriotisme dan patriotisme terjadi di dunia Islam secara

²² Ibid. hlm 66.

umum, dan di dalam adat NU secara khusus.

Wawasan nasionalisme Indonesia baik Islam maupun Indonesia pluralitas kebangsaan Indonesia, finalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan makna masyarakat dalam konteksnya. atau diskusi umum, debat, dan diskursus (wacana) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat di masa lalu. Wacananya yang berkembang pada masanya mencerminkan kondisi perkembangan intelektual masyarakat. Oleh karena itu, pola pikir dan perilaku seseorang atau suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pola pikir dan perilaku yang berkembang di seluruh dunia saat itu, termasuk dalam bidang agama. Selain itu, selalu ada proses dialektika yang berlangsung, yang menandakan bahwa perkembangan pola pikir memang tidak seragam. Sebagai anggota masyarakat global, mentalitas dan tindakan Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari pola pikir yang berulang. Konsekuensinya, bagian ini akan berbicara tentang materi atau percakapan diskusi dan percakapan tentang patriotisme dan patriotisme terjadi di dunia Islam secara umum, dan di dalam adat NU secara khusus. Wawasan nasionalisme Indonesia baik Islam maupun Indonesia pluralitas kebangsaan Indonesia, finalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan makna masyarakat dalam konteksnya²³.

Materi pelajaran yang sering dijadikan bahan diskusi terbatas atau umum, debat, dan diskursus (wacana) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat di masa lalu. Wacananya yang berkembang pada masanya mencerminkan kondisi perkembangan intelektual

²³ Ilman Nafi'a, *Dinamika Relasi Nahdlatul Ulama (NU) Dan Negara* (Depok: CV. Zenius Publisher, 2012). hlm 132.

masyarakat. Oleh karena itu, pola pikir dan perilaku seseorang atau suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pola pikir dan perilaku yang berkembang di seluruh dunia saat itu, termasuk dalam bidang agama. Selain itu, selalu ada proses dialektika yang berlangsung, yang menandakan bahwa perkembangan pola pikir memang tidak seragam. Sebagai anggota masyarakat global, mentalitas dan tindakan Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari pola pikir yang berulang. Konsekuensinya, bagian ini akan berbicara tentang materi atau percakapan diskusi dan percakapan tentang patriotisme dan patriotisme terjadi di dunia Islam secara umum, dan di dalam adat NU secara khusus.

Wawasan nasionalisme Indonesia baik Islam maupun Indonesia pluralitas kebangsaan Indonesia, finalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan makna masyarakat dalam konteksnya. atau diskusi umum, debat, dan diskursus (wacana) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat di masa lalu. Wacananya yang berkembang pada masanya mencerminkan kondisi perkembangan intelektual masyarakat. Oleh karena itu, pola pikir dan perilaku seseorang atau suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pola pikir dan perilaku yang berkembang di seluruh dunia saat itu, termasuk dalam bidang agama. Selain itu, selalu ada proses dialektika yang berlangsung, yang menandakan bahwa perkembangan pola pikir memang tidak seragam. Sebagai anggota masyarakat global, mentalitas dan tindakan Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari pola pikir yang berulang. Konsekuensinya, bagian ini akan berbicara tentang materi atau percakapan diskusi dan percakapan tentang patriotisme dan patriotisme terjadi di dunia Islam secara umum, dan di dalam adat

NU secara khusus. Wawasan nasionalisme Indonesia baik Islam maupun Indonesia pluralitas kebangsaan Indonesia, finalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan makna masyarakat dalam konteksnya²⁴.

A. Keislaman Keindonesiaan Nahdlatul Ulama (NU)

Istilah nasionalisme dan nasionalisme tampak identik, tetapi makna dan karakteristiknya berbeda. Wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau cara pandang kebangsaan karena menyatakan masyarakat orang-orang yang beranggotakan dan terikat bersama dalam solidaritas dalam suatu wilayah politik tertentu yang memiliki kewenangan atas politik otonom²⁵. Sedangkan Patriotisme adalah pemahaman filosofis publik, dengan tujuan agar ia menjadi dasar dan sumber motivasi untuk setiap gerakan publik. Benedict Anderson memahami bangsa secara keseluruhan melalui lensa komunitas terbayang, komunitas terbayang (*Imagine Community*). Anderson menegaskan bahwa konsep bangsa dipahami sebagai sesuatu yang secara definisi dibatasi karena keberadaan bangsa lain di luar batas, meskipun sangat fleksibel. Dia menegaskan bahwa tidak ada bangsa yang dapat membayangkan bahwa itu mencakup semua umat manusia²⁶.

Pengertian kebangsaan adalah ekspresi identitas berdasarkan keyakinan bersama tentang perlunya suatu komunitas menjadi bangsa dan membentuk negara. Nasionalisme dibangun atas dasar suku, bahasa, agama, daerah, dan identitas spesifik lainnya. Bangsa adalah bentuk pertama dan paling sederhana dari nasionalisme. Dalam Muktamar NU ke-29, Nahdlatul Ulama menyatakan

²⁴ Ilman Nafi'a, *Dinamika Relasi Nahdlatul Ulama (NU) Dan Negara* (Depok: CV. Zenius Publisher, 2012). hlm 132.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). hlm 1127.

²⁶ Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul Dan Penyebaran Nasionalisme* (Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2002). hlm 10-11.

bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang didasarkan pada adanya sekelompok orang yang karena berada dalam suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan yang adalah “kenyataan hidup” yang diyakini sebagai bagian dari kecenderungan dan kebutuhan alam dan manusia. Pengertian ini dikatakan berdasarkan adanya sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan yang merupakan “realitas kehidupan” diyakini menjadi bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi²⁷.

Pendapat Stanley Benn yang menyatakan bahwa nasionalisme setidaknya terdiri dari lima hal, dikutip oleh Nurcholish Madjid. Ini adalah: pertama, sejenis patriotisme yang dikenal sebagai semangat dan pengabdian kepada suatu bangsa; Kedua, penerapannya cenderung lebih mengutamakan bangsa itu sendiri daripada bangsa lain; ketiga, fokus pada identitas bangsa tertentu; keempat, mempertahankan gagasan bahwa budaya nasional itu unik; Kelima, nasionalisme adalah teori antropologi atau politik yang menekankan pembagian alamiah manusia menjadi bangsa-bangsa yang berbeda dengan identitas yang berbeda, khususnya 9 Dalam bahasa Inggris, tampak bahwa istilah "nasionalisme" dan "nasionalisme" sering digunakan secara bergantian, meskipun ada padanannya. kata untuk "wawasan kebangsaan" dalam bahasa lain yang belum ditemukan.

Dari pengertian diatas berarti wawasan kebangsaan dan nasionalisme memiliki makna ganda, sebagaimana ditunjukkan dari berbagai makna dan

²⁷ Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul Dan Penyebaran Nasionalisme* (Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 1999). hlm 3.

penjelasan di atas; Pertama, nasib, tujuan, dan identitas bersama dapat menumbuhkan ikatan solidaritas; kedua, mengenali aspek-aspek khas dari identitas seseorang, seperti suku, budaya, bahasa, dan bahkan mungkin agama; ketiga, pengakuan keragaman dan pluralitas entitas; keempat, kemerdekaan politik berupa bangsa yang merdeka.

B. Kemajemukan Kebangsaan Indonesia

Secara etis, jamak berasal dari akar kata bahasa Inggris “plural”, yang memiliki arti; jamak, banyak, banyak hal, banyak, atau banyak²⁸. Paling tidak, arti kata-kata ini menunjukkan bahwa pluralitas itu jamak, beragam, dan berbeda satu sama lain. Ini juga menunjukkan bahwa mayoritas menunjukkan solidaritas internal kontras (solidaritas dalam keragaman), karena tidak ada perbedaan, pluralisme, berfluktuasi dengan hampir tidak ada pemahaman tentang solidaritas atau solidaritas itu sendiri. Sementara pluralisme adalah suatu sistem yang didukung oleh suatu komunitas yang terdiri dari berbagai kelompok dengan pandangan politik, agama, ras, atau filosofi yang berlawanan²⁹. Nampak dari pengertian sebelumnya bahwa pluralisme dan pluralitas tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang, mereka adalah satu kesatuan. Mayoritas atau pluralisme akan menjadi isu utama bagi keberadaan manusia tanpa ada unsur pluralisme atau kerangka yang berfungsi sebagai pembantu mayoritas kehidupan itu sendiri.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengelola pluralitas dan konflik yang ada agar menjadi energi sosial bagi terciptanya tatanan bangsa yang lebih

²⁸ AS. Hornby, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English,” *Oxford University Press* (1987). hlm 643.

²⁹ *Ibid.* jlm 643.

baik jika pluralitas adalah sesuatu yang diberikan dan konflik adalah sesuatu yang melekat di dalamnya. Wajar jika responnya panjang dan membutuhkan evaluasi terhadap semua faktor yang ada. Namun dalam kaitannya dengan kajian ini (memahami pluralitas), ternyata pemahaman secara pasif dan apatis terhadap keberagaman di sekitar kita tidak cukup untuk menjaga keharmonisan. Memahami pluralisme meskipun sebenarnya juga membutuhkan pola pikir yang pluralis. Menghormati, memahami, dan mengakui keberadaan orang lain setara dengan menghormati dan mengakui keberadaan diri sendiri, dan sikap empati, jujur, dan adil menempatkan perbedaan pada tempatnya yang semestinya³⁰.

NU memandang pluralitas sebagai realitas dalam keputusan Muktamar ke-29 di Tasikmalaya, Cipasung, tahun 1994. Nahdlatul Ulama sangat menyadari keberagaman masyarakat Indonesia dan menjunjung tinggi sebagai sunatullah. Sebuah realitas dan berkah adalah keberagaman masyarakat baik dari segi agama, suku, budaya, dan sebagainya. Sepanjang seluruh keberadaan mayoritas Islam itu sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. NU berpendapat bahwa Islam menanamkan nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, dan kejujuran dalam pemeliharaan kehidupan bersama dengan tidak menafikan adanya perbedaan dalam aspek-aspek tertentu untuk memberikan jaminan dan toleransi untuk menjaga hubungan timbal balik 45. Setiap substansi mayoritas keberadaan manusia seperti agama, budaya, ras, bahasa dan lain-lain harus yakin untuk dapat memiliki pilihan untuk tetap bertepatan dengan yang lain, seperti yang dapat dipelajari oleh setiap elemen ini memiliki potensi untuk berjuang dengan orang

³⁰ Syafa'atun Elmirzanah, *Pluralisme, Konflik Dan Perdamaian Studi Bersama Antar Iman, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). hlm 7.

lain. Menjadi perekat potensial atau potensi konflik, entitas sangat bergantung pada kesadaran dan sikap manusia, atau setidaknya kesadaran untuk membuat banyak entitas menjadi jamak dan menjadi perekat potensial daripada konflik.

Azyumardi Azra menegaskan bahwa pluralisme bangsa dan wilayah bukanlah isu krusial dalam pemikiran Islam; Namun, pluralisme dalam politik modern, khususnya dalam kaitannya dengan negara bangsa, membutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Menurutnya, untuk menganut paham ummahan wâhidatan, penerimaan pluralisme politik paling tidak membutuhkan toleransi dan kesepakatan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Konflik dan pertempuran yang tidak akan pernah berhenti akan tercipta, tidak hanya antar negara-bangsa tetapi juga di dalam negara-negara Muslim, jika pluralisme politik, toleransi, dan konsensus tidak diselaraskan lebih awal³¹.

Agama adalah sumber konflik yang paling umum di antara banyak elemen yang membentuk kehidupan manusia. Selain itu, penyelesaian konflik berbasis agama akan lebih menantang karena biasanya melibatkan tidak hanya pemahaman doktrin dan ajaran agama yang dianggap sakral dan absolut, tetapi juga simbol-simbol agama yang mewakili identitas agamanya yang khas. Konflik atas nama agama diawali dengan keterbatasan pemahaman doktrin ajaran agama dan keengganan untuk mengenal orang lain. Oleh karena itu, di negara-negara dengan pluralitas agama seperti Indonesia, “pluralisme agama” selalu menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan yang terus berlangsung³².

Salah satu contoh yang baik bagi warga NU di Cirebon dan wali Pondok

³¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga PostModernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996). hlm 11.

³² M. Syafii Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995). hlm 229.

Pesantren Jagasatru Kota Cirebon KH. Habib Sharif Muhammad Yahya menegaskan bahwa pluralisme agama dengan toleransinya, kesesuaian umat Islam dengan ajarannya, rasa hormat yang cukup, dan tidak mengintervensi keberadaan umat cukup untuk membenarkan kerjasama yang lebih erat. Sementara itu, ia mengklaim bahwa kolaborasi yang lebih dekat antara komunitas Muslim dan komunitas lain cenderung lebih baik bagi komunitas tersebut daripada komunitas Islam secara keseluruhan. Akibatnya, menurutnya, toleransi pluralisme agama membutuhkan upaya yang signifikan untuk menghormati dan menghindari konflik. Selain itu, tampaknya pemahaman ini diterima secara luas oleh para pemimpin Muslim lainnya. Jadi bagaimana mereka bisa menafsirkan perlawanan dalam pluralisme yang ketat dibatasi pada upaya untuk saling menghargai satu sama lain cobalah untuk tidak memperlambat satu sama lain³³.

Pluralisme agama, atau ajaran pluralisme, menurut Nurchoish Madjid, menekankan pemahaman dasar bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hidup, dengan resiko ditanggung oleh pemeluk agama masing-masing, baik secara individu maupun kolektif³⁴. Pluralisme agama tidak perlu dimaknai sebagai pengakuan atas kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari. Dia mengklaim bahwa jika semua agama dimulai dengan prinsip yang sama, yaitu kebutuhan akan ketundukan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka agama-agama yang baik karena interaksinya satu sama lain atau dinamika internalnya pada akhirnya akan menemukan kebenaran tentang asal-usulnya

³³ Nafi'a, *Op.cit.*, hlm 152.

³⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadani, 1992). hlm 182.

sendiri, membawa semuanya ke satu titik temu yang dikenal sebagai "platform bersama", atau "*kalimah sawâ*" dalam Al-Qur'an³⁵.

Dalam menyikapi pluralisme agama, setiap agama harus berupaya memahami dan menilai "kebenaran" agama berdasarkan standar pemeluknya, serta memberi ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mengartikulasikan keyakinannya secara bebas. Alwi Shihab menggambarkan pluralisme agama dengan baik. "Pluralitas agama adalah setiap pemeluk suatu agama dituntut tidak hanya mengakui keberadaan dan hak orang lain, tetapi juga berusaha memahami perbedaan dan persamaan, guna mencapai keharmonisan batin dalam keberagaman," ujarnya. Di Indonesia, toleransi antar umat beragama akan dibangun dengan memahami pluralisme sejati dan mengupayakan kehidupan yang damai³⁶.

Alwi Shihab mengatakan bahwa pluralisme dapat dipahami dengan berbagai cara. Pertama, pluralisme lebih dari sekedar menunjuk pada realitas di luar pluralitas; melainkan secara aktif terlibat dalam realitas pluralisme. Pluralisme agama menuntut pemeluk satu agama untuk tidak hanya mengakui hak dan keberadaan agama lain, tetapi juga berpartisipasi dalam upaya memahami perbedaan dan mencapai kesepakatan untuk mencapai kerukunan dalam keragaman. Kedua, kosmopolitanisme dan pluralisme harus dibedakan. Kosmopolitanisme adalah gagasan bahwa orang-orang dari berbagai agama, ras, dan negara hidup bersama di satu tempat. Namun, sangat sedikit interaksi positif antar warga, khususnya di bidang agama. Ketiga, pluralisme dan relativisme

³⁵ Ibid. hlm 182.

³⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: An Teve Mizan, 1999), hlm 41.

bukanlah konsep yang dapat dipertukarkan. Menurut relativisme, pandangan seseorang atau masyarakat tentang kehidupan dan keadaan mental menentukan kebenaran atau nilai. Cara berpikir seperti ini menimbulkan persepsi bahwa semua agama adalah sah dan dapat diperbandingkan. Karena itu, ini tidak mengakui kebenaran universal dan abadi³⁷.

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pluralisme agama, perlu diperhatikan hal-hal penting berikut dari definisi dan penjelasan di atas: pertama, bahwa pluralisme agama adalah menerima adanya perbedaan agama, dan kedua; pengakuan bahwa pluralisme agama ada bukan hanya karena realitas sosial tetapi juga karena ajaran (teologis) agamanya; Keempat, setiap agama memiliki nilai kebenaran berdasarkan standar kebenaran agama, dan Kelima, pengakuan terhadap agama lain tidak berarti menghilangkan identitas agamanya sendiri. Pluralisme agama membutuhkan lebih dari sekadar saling menghormati dan berdialog; itu juga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak dalam melestarikan dan mengembangkan identitas keagamaan masing-masing³⁸.

C. Finalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ada banyak suku, ras, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda di Indonesia. Kebhinekaan ini sangat berpotensi menimbulkan konflik, begitu pula banyak potensi bagi perkembangan kebudayaan bangsa ini. Akibatnya, topik wawasan kebangsaan inklusif selalu diangkat sebagai tuntutan untuk menghadapi kerawanan konflik dan disintegrasi bangsa. Proses pencarian yang panjang dan

³⁷ Ibid. hlm 41-44.

³⁸ Bachtiar Effendi, *Menyoal Pluralisme Di Indonesia” Dalam Raja Juli Antoni, (Ed), Living Together in Plural Societies; Pengalaman Indonesia Inggris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 239-249.

bertahap diikuti dengan berbagai bentuk, antara lain sumpah pemuda 28 Oktober 1928, proklamasi kemerdekaan, dan dokumen UUD 1945. Penemuan wawasan kebangsaan atau nasionalisme berdasarkan persamaan identitas seperti agama, budaya, dan suka dalam konteks sejarah kajian disebut sebagai protonasionalisme³⁹.

Salah satu proses pencarian dan pemaknaan diri sebagai suatu identitas yang khas atau unik yang berbeda dengan yang lain adalah melalui kesadaran primordial tersebut. Kehadiran dan perluasan kolonialisme di Nusantara yang membongkar tatanan mapan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya tradisional secara masif, menjadi latar belakang momentum sejarah. Kolonialisme tidak hanya berdampak pada krisis legitimasi ideologis dan politik yakni berakhirnya klaim kekuasaan tradisional Sultan dan Raja di seluruh nusantara tetapi juga menghadirkan gagasan dan sistem ekonomi politik baru yang bersaing dengan mereka dan bahkan menggantikan sistem saat ini. Konsekuensinya, kekuatan konvensional menemui jalan yang diremehkan, baik di levelnya pikiran dan otoritas, dengan tujuan agar sendi-sendi kekuatan menambah wawasan dievakuasi dari fondasi dasarnya⁴⁰.

Raja dan sultan terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah kolonial pada tingkat kekuasaan yang sebenarnya. Juga, mereka sering hanya digunakan sebagai perpanjangan tangan, gambar kekuatan atau dengan bahasa yang lebih natural bagi mereka dimanfaatkan sebagai “ringan” bagi pemerintahan perintis, jadi kekuatan politik dan keuangan mereka juga merupakan anugerah dari

³⁹ Nafi'a, *Op.cit.*, hlm 160.

⁴⁰ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir : Konsep, Ragam , Kritik, Dan Masa Depan*nya (Yogyakarta: Qalam, 2004). hlm 119.

pemerintahan perintis. Ini sering mempercepat keterasingan penguasa lokal terhadap rakyat, memastikan bahwa kekuasaannya lumpuh di semua aspek. Situasi seperti ini membuka peluang bagi penguasa baru di luar Istana, termasuk para pendeta dengan pengaruh sosial yang signifikan. Kerinduan akan kemerdekaan dan kejayaan masa lalu kemudian mulai kembali dari lokasi ini. Para pemimpin dari fase ini kemudian berusaha mencari landasan yang dapat memobilisasi kekuatan masyarakat yang bersumber dari keyakinan agama, suku, dan budayanya. Kesadaran untuk melawan kolonialisme yang dianggap telah mencederai tatanan yang dianggap sudah mapan di masa lalu, muncul dari sini.

Semangat perlawanan ini berakar pada identitas suatu kelompok baik itu agama, suku, atau budaya yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Generasi berikutnya memperoleh identitas atau identitas ideologis. Sintesis baru antara kesadaran identitas lokal dan wacana kesadaran identitas yang lebih luas, atau disebut nasionalisme modern, terjadi setelah melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan bangsa ini merupakan hasil dari proses dialektika yang melibatkan faktor partikular dan universal, potensi lokal dan global, serta dimensi tradisional dan kontemporer.

Selain itu, kesadaran tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kesepakatan bersama dalam Pancasila dan UUD 1945. Nahdhatul Ulama' (NU) merupakan salah satu elemen yang terlibat aktif dalam penyusunan kesepakatan ini. KH mengklaim sebanyak itu. Ma'ruf Amin, salah satu tokoh NU yang apalagi salah satu pengurus MUI memaknai bahwa pengakuan NU terhadap negara negara atau negara bergantung pada patriotisme Indonesia yang berlandaskan negara.

Pancasila dan UUD 1945, serta peniadaan kemungkinan khilâfat, sejak NU menganggap adanya kondisi kesatuan NKRI sebagai sebagai pemahaman seluruh komponen bangsa, yang harus dipatuhi oleh semua perkumpulan, menghitung NU⁴¹.

D. Kontektualisasi Pemaknaan Keumatan Dan Kebangsaan

Dalam bahasa Indonesia, istilah "umat" atau "ummah" biasanya digunakan untuk menyebut suatu komunitas ideologis suatu agama tertentu atau sekelompok orang yang memiliki keyakinan agama yang sama, seperti; orang yang beragama Hindu, Kristen, dan Islam. Namun, berbeda dengan istilah "bangsa", "ummah" lebih sering digunakan dalam konteks kajian Islam dan politik Indonesia untuk merujuk pada ikatan emosional dalam agama Islam. Ummah didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama terlepas dari berbagai perbedaan mereka. Akibatnya, umat Islam lebih sering menggunakan kata "ummah", dan itu memiliki arti khusus bagi mereka. Istilah "ummah" yang digunakan dalam perspektif ini merujuk pada seluruh komunitas Muslim⁴².

Abdullah al-Akhsan dalam bukunya "*ummah or country*" masuk akal berbagai implikasi "ummah". Ia mengatakan bahwa ada dua cara untuk memahami kata "ummah", yang pertama: perspektif tekstual, khususnya definisi istilah "ummah" yang terdapat dalam Alquran, sumber utama ajaran Islam. kedua, makna kata "ummah" dalam kaitannya dengan konteks sejarahnya. ramah Menurut teks, kata Arab "ummah" berarti sekelompok orang atau komunitas. Al-Qur'an menggunakan kata "ummah" dalam beberapa cara, beberapa di antaranya

⁴¹ Nafi'a, *Op.cit.*, hlm 162.

⁴² Bassam Tibi, *Islam between Cultures and Politics* (New York: Palgrave, 2001). hlm 122.

adalah sebagai berikut: Pertama-tama, ummah mengacu pada makhluk hidup. Ayat 38 Surat al-An'âm dari Al-Qur'ân memiliki makna ini, yaitu " Dan umat-Ku, seperti kamu (manusia), dan tidak ada binatang yang berjalan di bumi dan burung yang terbang dengan sayap Kata "ummah " dalam ayat ini mengacu pada semua makhluk hidup di Bumi, termasuk berbagai jenis, bentuk, dan spesiesnya. Kedua, komunitas tunggal disebut sebagai "umat". Definisi ini berasal dari Surat Yunus ayat 19 Alquran, yang berbunyi, “Dan (ketahuilah) bahwa semua manusia dulunya adalah satu umat (umatan wahidatan), kemudian berbeda pandangan.” Ummat pada bagian ini memiliki memahami bahwa semua jaringan dengan kontras yang berbeda di dunia ini berasal dari satu orang tua, tepatnya sebagai anak cucu dari Nabi Adam dan Siti Hawa⁴³.

Ketiga, ummah dalam arti pengikut Nabi yang setia. Definisi ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 47 yang menyatakan bahwa “setiap umat memiliki rasul. Oleh karena itu, ketika utusan mereka tiba, keputusan yang adil tercapai di antara mereka, dan mereka sama sekali tidak dianiaya. Keempat, ummat juga menyinggung keyakinan yang dipegang oleh pertemuan tertentu. Pemahaman ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat al-Zukhrûf ayat 22 yang berbunyi, “Sesungguhnya mereka berkata, “Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berpegang teguh pada iman (ummah), dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. dengan mengikuti jejak mereka”⁴⁴.

Secara tekstual, kata "ummah" dapat dipahami dari berbagai makna yang tercantum di atas; Untuk memulai, ummah mengacu secara khusus pada

⁴³ Abdullah Al-Ahsan, “Ummah Atau Bangsa, Krisis Identitas Masyarakat Muslim Kontemporer,” *STAIN Salatiga Press* (2005). 3-9.

⁴⁴ *Ibid.* 7-8.

komunitas ideologis. Kedua, ummat menjalani kehidupannya di sekitar seperangkat keyakinan. Ketiga, ummat memiliki suri tauladan yang menjadi tolak ukur perilakunya sendiri dan menjadi panutan bagi dirinya. Keempat, umat terikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu untuk menegakkan keyakinan dan ajarannya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik serupa pernah dilakukan oleh tiga peneliti yaitu:

1. Penelitian Yusuf Widodo (2014) dengan Judul Peran Dan Partisipasi Nahdlatul Ulama Dalam Politik Lokal (Studi Tentang Peran Dan Partisipasi Politik Kiai Dalam Pengelolaan Kekuasaan Pemerintahan Di Kabupaten Gresik).
2. Penelitian Muhammad Farhanuddin (2017) dengan judul Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pendidikan Politik Di Kabupaten Majene.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut yaitu metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya adalah dari segi lokasi penelitian. Dari dua penelitian yang relevan lokasinya berbeda dengan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari segi persamaannya yaitu dari objek kajian atau tema yang diangkat dalam dua penelitian tersebut, yaitu membahas tentang peranan NU dalam Pendidikan Politik. Berikut merupakan penelitian relevan yang telah dilakukan

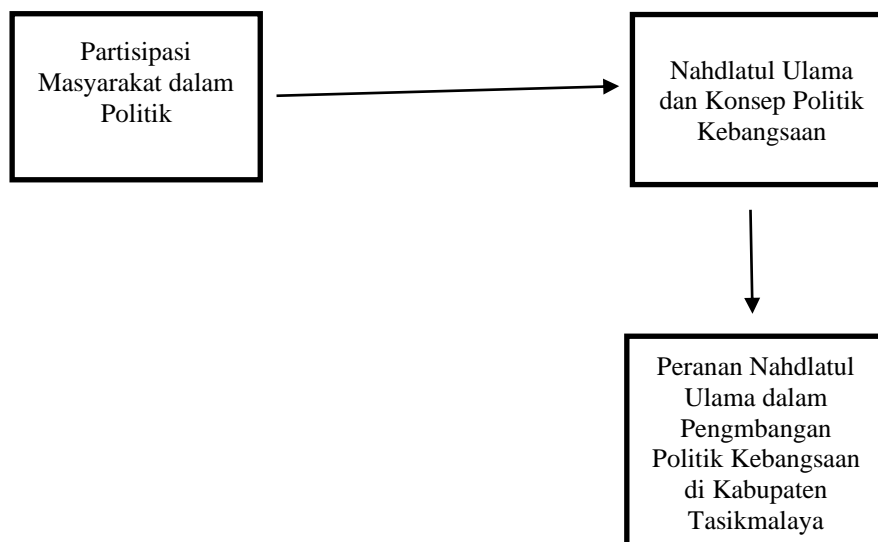
yang tertera dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan
Penelitian Yusuf Widodo (2014)**

| Penelitian Yusuf Widodo (2014) | |
|---|--|
| Judul | Peran Dan Partisipasi Nahdlatul Ulama Dalam Politik Lokal (Studi Tentang Peran Dan Partisipasi Politik Kiai Dalam Pengelolaan Kekuasaan Pemerintahan Di Kabupaten Gresik). |
| Lokasi | Desa Sampang Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen |
| Rumusan Masalah | 1. Bagaimanakah peran dan partisipasi politik kiai dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Gresik? 2. Siapa sajakah pihak yang mendapatkan keuntungan dari peran dan partisipasi politik kiai dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Gresik? |
| Penelitian Muhammad Farhanuddin (2017) | |
| Judul | Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pendidikan Politik Di Kabupaten Majene. |
| Lokasi | Kabupaten Majene |
| Rumusan Masalah | 1. Bagaimana NU menjalankan perannya sebagai agen pendidikan politik di Majene? |
| Penelitian Asep Herman (2022) | |
| Judul | Peranan Nahdlatul Ulama Dalam Pendidikan Politik Kebangsaan Di Kabupaten Tasikmalaya 2019 |
| Lokasi | Kabupaten Tasikmalaya |
| Rumusan | Bagaimana Peranan Nahdlatul Ulama Dalam Pendidikan Politik |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Masalah | Kebangsaan Di Kabupaten Tasikmalaya.? |
|---------|---------------------------------------|

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah memahami keadaan politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya dan Partisipasi Masyarakat dalam Politik Lokal. Setelah itu pemeriksaan akan dilanjutkan dengan membedakan masalah melalui

survei tentang implementasi konsep Politik Kebangsaan dari Nahdlatul Ulama. Peneliti akan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan Pengurus PCNU Kabupaten Tasikmalaya terkait implementasi dari konsep politik kebangsaan Nadhaltul Ulama dan Peranan dari Nahdlatul ulama dalam Pengembangan Politik Kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya tahun. Setelah itu peneliti akan menganalisis peranan NU dalam Pengembangan Politik Kebangsaan dan pengaruhnya terhadap pemahaman politik masyarakat dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam partisipasi terhadap kegiatan politik.